

BAB IV
DAMPAK PERKEMBANGAN BATAVIAASCH GENOOTSCHAP VAN
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN TERHADAP PENCERAHAN
ILMU PENGETAHUAN

A. DAMPAK SOSIAL BUDAYA

Pendirian *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW) memiliki dampak penting bagi masyarakat dan pemerintah di masa kolonial. BGKW sebagai institusi ilmu pengetahuan mulai diperhitungkan sejak gerakan revolusi ilmiah 1848 yang gagal di Batavia, membuat kegiatan ilmu pengetahuan seperti riset, ekspedisi, dan pengembangan keilmuan menjadi proyek negara. Hal ini juga berdampak dalam dunia keilmuan yang terbagi antara ilmuwan amatir dan ilmuwan resmi negara di bawah pemerintah kolonial.¹

Ilmu pengetahuan menjadi pilihan karier dalam pemerintahan pada masa kolonial. Pada abad ke-19, ideologi kolonial tentang perdamaian dan kemakmuran mendominasi pegawai negeri yang dipengaruhi gerakan pencerahan. Pemerintah kolonial mengendalikan agenda yang berhubungan ilmu pengetahuan dengan sangat efektif.² Ilmu pengetahuan juga berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat di Batavia. Bagi masyarakat Eropa yang dipengaruhi gerakan pencerahan, mereka berusaha membawa gerakan keilmuan ke Hindia Belanda. Rata-rata masyarakat Eropa ini dipekerjakan oleh pemerintah kolonial sebagai pegawai negeri. Mereka juga merasa bertanggungjawab dan memiliki pengaruh penting dalam mengarahkan kebijakan untuk masa depan Hindia Belanda.

¹ Andrew Goss, *Belunggu Ilmuwan dan Pengetahuan: Dari Hindia Belanda Sampai Orde Baru* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 21.

² *Ibid.*, hlm. 41.

1. Membangun Paradigma Masyarakat Tercerahkan

Usaha membangun masyarakat tercerahkan atau masyarakat madani (menurut Andrew Goss) di Hindia Belanda, khususnya Batavia memiliki sejarah yang panjang. Paradigma ini coba diwujudkan oleh BGKW sejak pendiriannya pada tahun 1778. Dipimpin oleh J.C.M. Radermacher, perkumpulan masyarakat ilmiah BGKW mulai memelopori masyarakat pencerahan di Batavia. Aktivitas dalam masyarakat tercerahkan ini ternyata memiliki hubungan dengan golongan pencerahan dari organisasi *Vrijmetselarij* (Tarekat Mason Bebas)³ dan *Nederlandsch-Indische Theosofische Vereeniging* (Masyarakat Teosofi Hindia Belanda).⁴ Meski sama-sama didirikan oleh Radermacher, BGKW dan *Vrijmetselarij* merupakan dua organisasi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang tercerahkan.⁵

Tujuan pendirian BGKW terdapat dalam Pasal 2 Programma ialah "Memajukan pengetahuan-pengetahuan kebudayaan, sejauh hal-hal ini berkepentingan bagi pengenalan kebudayaan di Kepulauan Indonesia dan kepulauan sekitarnya". Slogannya berbunyi "Ten Nutte van het Algemeen" atau "Untuk Kepentingan Masyarakat Umum".⁶ Kegiatan BGKW lebih banyak melakukan diskusi, menyebarkan ilmu pengetahuan dan praktiknya dilaksanakan

³ Tri Ilham Pramudya, "Hubungan Vrijmetselarij dan Elit Pribumi di Jawa (1908-1962)", *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm.27.

⁴ Hakiki Haria Wicaksana, "Dinamika Nederlandsch-Indische Theosofische Vereeniging Di Batavia 1912-1933", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), hlm. 12.

⁵ Dr. Th. Stevens, *Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764- 1962* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 156.

⁶ *Programma van het Bataviaasch Genootschap, opgericht te Batavia in 1778*.

dengan kompetisi ilmiah, publikasi, dan pengembangan koleksi.⁷ Aktivitas tahunan pertama perkumpulan ini dilakukan dari halaman rumah Radermacher di jalan kali besar, Batavia. Gerakan ini dilakukan dengan merekrut kalangan elit VOC yang tertarik dengan tradisi ilmu pengetahuan yang sedang populer di Eropa menjadi anggota BGKW.

Paradigma pencerahan benar-benar dimulai pada 1848 ketika beberapa kalangan merasa yakin dengan mengadakan pertemuan yang dipimpin oleh Van Hovevell, pemimpin BGKW (1846-1848). Pertemuan ini mendiskusikan kemungkinan terbukanya akses penerimaan pekerja di pemerintahan bagi kaum kolonialis yang lahir di Hindia Belanda dengan diperluasnya kesempatan pendidikan di Batavia.⁸ Pertemuan ini juga menjadi titik balik dalam gerakan revolusi ilmiah Batavia yang berusaha dijalankan sejak berdirinya perkumpulan BGKW pada tahun 1778. Meski gagal pertemuan dan aksi protes ini dikenang dalam sejarah sebagai “Revolusi Intelektual Batavia 1848”.⁹

Paradigma pencerahan mulai menyentuh masyarakat pribumi ditandai dengan bergabungnya orang-orang elit pribumi ke dalam perkumpulan masyarakat ilmiah BGKW. Anggota pribumi pertama BGKW yaitu Sultan Sumenep Paku Nataningrat I dan Bupati Besuki Raden Adipati Ario Prawiro Adiningrat. Dua anggota asli Indonesia kemudian resmi bergabung dalam BGKW pada 13 Januari 1826.¹⁰ Paku

⁷ Hans Groot, *Van Batavia naar Weltevreden; Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1778-1867* (Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 2009), hlm. 81.

⁸ Andrew Goss, *op.cit.*, hlm.19.

⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁰ Hans Groot, *op.cit.*, hlm. 229 ; ANRI KBG Dir 0053-4, vergaderingen 13-1-1826 voor de bekrachtiging.

Nataningrat memang dikenal sebagai seorang yang pakar di bidang bahasa, sastra, budaya dan sejarah. Ia memiliki latar belakang keluarga bangsawan yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Paku Nataningrat bersama sepupunya bahkan menjadi kontributor sekaligus narasumber dalam *History of Java* yang diproduksi atas nama Thomas Stamford Raffles. Atas jasanya, Paku Nataningrat mendapat gelar Doktor Honoris Causa di bidang Kebudayaan dari Kerajaan Inggris, bernama *Letterkundige*. Bersama dengan gelar tersebut dihaturkan juga sebuah kereta kencana yang selanjutnya dikenal dengan nama Melor di atas.¹¹

Disusul Raden Adipati Ario Prawiradiningrat, seorang Bupati dari Karesidenan Besuki. Tokoh pribumi yang juga memiliki pengaruh besar di kalangan elit pribumi ini bergabung dengan BGKW. Pribumi lain yang diangkat langsung sebagai anggota kehormatan adalah Pangeran Mangkunegara dari Surakarta.¹² Anggota pribumi BGKW yang paling dikenal berkontribusi adalah Raden Saleh. Memiliki pendidikan Barat dan sekaligus pelukis handal, Raden Saleh memiliki minat besar dalam ilmu arkeologi di tanah kelahirannya, Jawa.¹³

Dalam perjalanannya, pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat kolonial hanya terbatas pada kebijakan pemerintah kolonial saja. Pada akhir abad ke-19, setelah penerapan sistem ekonomi liberal berbagai riset hanya bergantung pada kepentingan pemerintah dan swasta. Melchior Treub, seorang ilmuwan kebun

¹¹ Januar Amri, *Kerajaan Sumenep Pada Masa Pemerintahan Sultan Abdurrahman di Madura (1811 – 1854)*, Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2017)

¹² Hans Groot, *Ibid.*

¹³ A. Nurkidam dan Hasmiah Herawaty, *Arkeologi Sebagai Suatu Pengantar* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 50.

raya Buitenzorg melihat bahwa ilmu pengetahuan sangat terkekang oleh birokrasi.¹⁴ Pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal pendidikan di Hindia Belanda baru benar-benar mulai terlihat dan dirasakan dampaknya ke masyarakat pribumi pada awal abad ke-20, dengan mulai diterapkannya Politik Etis.

Tokoh-tokoh pribumi yang kelak berjasa pada masa kebangkitan nasional Indonesia banyak memiliki hubungan dengan BGKW. Sebagian dari tokoh-tokoh ini merupakan golongan tercerahkan dalam pendidikan. Tokoh awal yang mengemukakan pandangannya tentang BGKW adalah Raden Ajeng Kartini. Dalam surat-suratnya dengan beberapa rekannya orang Belanda sebagai sahabat pena. Salah satu rekan Belanda adalah anggota BGKW bernama Mr. J.H. Abendanon. Pada kemudian hari, Abendanon memiliki peranan penting dalam mengumpulkan dan menerbitkan surat-surat Kartini menjadi sebuah buku berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”.¹⁵

Kartini mengapresiasi BGKW atas usahanya dalam mempelajari dan melestarikan budaya Indonesia. Kakak dari RA Kartini, RMP Sosrokartono pernah ditawarkan sebagai Direktur di salah satu bagian di BGKW namun ditolaknya dengan alasan ingin beristirahat.¹⁶ Selain Kartini, tokoh bangsa lain yang memiliki hubungan dengan BGKW adalah Tan Malaka. Salah satu karya besarnya berjudul Madilog ditulis ketika Tan Malaka singgah di Batavia dan sering mengunjungi

¹⁴ Andrew Goss, *op.cit.*, hlm.135.

¹⁵ Balqis Fallahnda, Apa Isi Buku Habis Gelap Terbitlah Terang Karya Kartini?, *Tirto*, <https://tirto.id/apa-isi-buku-habis-gelap-terbitlah-terang-karya-kartini-gEUj> diakses 05 Februari 2024.

¹⁶ Aryono, Pengembaraan Seorang Pangeran Jawa, *Historia*, <https://premium.historia.id/article-premium/pengembaraan-seorang-pangeran-jawa> diakses 05 Februari 2024.

Perpustakaan BGKW sebagai sumber referensi dan inspirasinya. Ia menghabiskan tiga jam sehari untuk menulis Madilog atau total 720 jam selama lebih dari 8 bulan dari Juli 1942 hingga Maret 1943.¹⁷

2. Pengaruh dalam Kebijakan Sosial Budaya

Setelah Inggris meninggalkan Jawa, pada tahun 1822 di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Van der Capellen pemerintah kolonial membentuk sebuah komisi inventarisasi dan mulai melibatkan BGKW sebagai institusi yang berurusan dengan peninggalan purbakala.¹⁸ Komisi inventarisasi ini dirancang untuk mencari, mengumpulkan, dan menyimpan artefak budaya serta mencegah penjarahan oleh orang Tionghoa atau agen-agen lokal. Pada masa Gubernur Jenderal J.C. Baud pegawai pemerintah di seluruh Hindia Belanda diinstruksikan untuk membantu mencari objek-objek seperti artefak dan patung untuk koleksi Museum BGKW atau dikirim ke Belanda sebagai koleksi nasional Belanda. Kegiatan tersebut dilakukan demi perlindungan benda-benda budaya yang lebih baik.¹⁹

Pada 1855 dikeluarkan sebuah Undang-Undang Penemuan Harta Karun yang menyatakan semua temuan arkeologi harus dilaporkan ke pemerintah dan kemudian BGKW dapat membeli dengan harga yang sesuai taksirannya.²⁰ Museum BGKW

¹⁷ Pusat Perbukuan, *Sejarah Perbukuan: Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), hlm. 12.

¹⁸ Marieke Bloembergen and Eickhoff, *The Politics of Heritage in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), hlm. 38–39.

¹⁹ Carsten Stahn, *Confronting Colonial Objects: Histories, Legalities, and Access to Culture* (Oxford: Oxford University Press, 2023), hlm. 90.

²⁰ Endang Sri Hardianti dkk., *Potret Museum Nasional: Dulu, Kini, & Akan Datang* (Jakarta: Museum Nasional Indonesia, 2014), hlm. 10.

selama berangsur-angsur menjadi tempat penyimpanan koleksi-koleksi dan objek bersejarah oleh pemerintah kolonial. Dengan kebijakan pemerintah kolonial yang menjadikan Museum BGKW sebagai tempat pengumpulan benda-benda budaya dari seluruh Hindia Belanda membuat jumlah koleksi bertambah signifikan. Penambahan jumlah koleksi ternyata tidak selalu menguntungkan bagi Museum BGKW karena terdapat penambahan biaya perawatan dan penambahan ruang untuk penyimpanan koleksi.²¹

Pada 1840, Gubernur Jenderal membuat kebijakan bahwa candi dan artifak di Hindia Belanda sebagai properti publik dan di bawah kekuasaan negara kolonial, segala bentuk pemindahan dan penghancuran subjek budaya harus dengan persetujuan pemerintah kolonial.²² Kebijakan ini bertujuan guna melindungi benda-benda budaya yang berpotensi dijarah dan diperdagangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Meskipun begitu kebijakan ini mengakibatkan kepemilikan seluruh peninggalan budaya dan harta karun di Hindia Belanda menjadi milik negara Belanda dan mereka berhak untuk membawa benda-benda tersebut ke Belanda hingga pemerintah kolonial berakhir pada 1942.

Dalam kesempatan lain, BGKW melalui anggota-anggotanya sering dilibatkan dalam berbagai ekspedisi ilmiah maupun militer yang diprakarsai pemerintah. Salah satu ekspedisi militer yang juga melibatkan anggota BGKW adalah Ekspedisi Militer di Lombok pada tahun 1894. Jan Laurens Andriens Brandes ikut dalam ekspedisi militer yang dilakukan oleh KNIL. Ekspedisi ini

²¹ *Ibid.*

²² Van Beurden, *Treasures in Trusted Hands: Negotiating the Future of Colonial Cultural Objects* (Leiden : Sidestone Press, 2017), hlm. 78.

berhasil menaklukan Raja Lombok dan Istananya. Istana atau Puri Kerajaan Lombok yang bernama Puri Cakranegara itu hancur dan ternyata di dalamnya terdapat banyak koleksi naskah kuno.²³

Pada 18 November 1894 salah satu dari naskah kuno yang disebut sebagai Naskah Negarakertagama dari Kerajaan Majapahit ditemukan oleh Brandes di antara puing-puing istana.²⁴ Beberapa tahun kemudian, naskah Negarakertagama yang teridentifikasi berbahasa kawi diterbitkan sebagian dengan aksara Bali dan bahasa Belanda oleh Brandes. Tulisan tersebut terbit dengan judul “Nagarakertagama, Lofdicht van Prapanca op koning Rajasanagara, Hayam Wuruk van Majapahit, uitgegeven naar het eenige daarvan bekende handschrift aangetroffen in de puri te Tjakranegara op Lombok” (*Nagarakertagama, pujian Prapanca kepada Raja Rajasanagara, Hayam Wuruk dari Majapahit, diterbitkan setelah satu-satunya naskah yang ditemukan dari puri di Tjakranegara di Lombok*) dalam *Verhandelingen Bataviaasch Genootschap* (VBG) yang terbit tahun 1902.²⁵ J.H.C Kern kemudian mengomentari naskah ini pada 1905-1914. N.J. Krom, salah satu anggota BGKW berhasil menerbitkan secara utuh isi dari lontar naskah Negarakertagama ini dengan judul “Het Oudjavaansche lofdicht Nagarakertagama van Prapanca (1365 AD)” dalam VBG yang terbit tahun 1919.²⁶

²³ Petrik Mattanasi, “Selamatkan Negarakertagama dari Aksi KNIL”, *Historia*, <https://historia.id/kultur/articles/selamatkan-negarakertagama-dari-aksi-knil-PNLmj/page/2> diakses pada 27 Desember 2023

²⁴ Sania Aqila, Pengakuan UNESCO Kepada Indonesia Tentang Memory of The World Naskah Negarakertagama, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm. 63.

²⁵ VBG Deel LIV, 1902.

²⁶ H. Kern dan N.J. Krom, *Het Oudjavaansche lofdicht Nagarakertagama van Prapanca (1365 AD)*, (Wetvevreden: Drukkerij Volkslectuur, 1922).

Selain penemuan naskah Negarakertagama, salah satu naskah yang juga penting adalah penemuan Serat Pararaton. Berkaitan dengan serat pararaton ini, Brandes kemudian melakukan penelitian dan menerbitkan publikasi berjudul “Pararaton of het boek der koningen van Tumapel en van Majapahit uitgegeven en toegelicht” dalam VBG Deel XLIX yang terbit tahun 1896.²⁷ Dimulainya penelitian tentang Naskah Nagarakertagama dan Serat Pararaton oleh peneliti-peneliti dari BGKW menjadikan sumber awal tentang sejarah-sejarah kuno di Nusantara mulai terbuka. Literatur-literatur ini menjadikan sumber utama keberadaan sebuah kerajaan yang pernah besar dan menguasai kepulauan Hindia pada masa lalu. Melalui literatur ini penelitian sejarah tentang berbagai kerajaan kuno seperti Majapahit dengan metode ilmiah dimulai.

3. Gerakan Pencerahan dalam Politik Etis

Kebijakan Politik Etis pertama kali digunakan di Hindia Belanda pada tahun 1901 merupakan terobosan cukup maju. Masyarakat pribumi Hindia Belanda berkembang dengan baik berkat kebijakan ini. Kaum elit pribumi, yang akhirnya menjadi penggerak kemerdekaan Indonesia, muncul sebagai hasil dari politik etis. Pemerintah kolonial menganggap politik etis sebagai "hutang kehormatan" kepada bangsa Indonesia. Irigasi, pendidikan, dan emigrasi menjadi paket utama dari kebijakan politik etis.²⁸

Dengan diterapkannya Politik Etis, kebijakan ini menghasilkan pembentukan sekolah-sekolah bagi kaum pribumi. Dibangun sekolah dasar, menengah, sekolah

²⁷ VBG Deel LXIX, 1896.

²⁸ M.C Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004* (Jakarta: Serambi Ilmu, 2005)

keguruan, dan sekolah tinggi. Sementara anak laki-laki hanya diajarkan di sekolah, anak perempuan hanya diajarkan di rumah dan di lingkungan keluarga.²⁹ Anak perempuan diajarkan untuk menjadi ibu rumah tangga, seperti memasak, menjahit, dan membatik.

Kebijakan Politik Etis yang diterapkan membuat gerakan pencerahan mulai meluas di kalangan masyarakat pribumi. Politik Etis juga membuat masyarakat pribumi yang menikmati pendidikan tinggi naik signifikan. Hoesein Djajadiningrat, yang berasal dari salah satu keluarga terkenal di Jawa Barat menjadi anggota BGKW dan ahli permuseuman. Hossein Djajadiningrat adalah orang pribumi pertama yang berhasil meraih gelar doktor di Universitas Leiden.³⁰

Lahirnya Politik Etis, menjadikan Hindia Belanda merperbaharui berbagai lembaga, kementerian, dan pejabat-pejabat baru di tingkat nasional dan daerah. Namun Politik Etis juga memiliki dampak cukup serius di mana terdapat kewenangan dalam sebuah badan pemerintah yang menaungi pakar-pakar teknis, termasuk ilmuwan sejarah alam, peneliti sosial, dan insinyur. Mereka bertugas mengarahkan masyarakat koloni terutama pribumi menuju kemodernan. Kebijakan ini juga membuat pencerahan ilmu pengetahuan yang profesional menjadi bagian formal dan permanen dalam sistem pemerintahan kolonial pada awal abad ke-20. Hal ini bertujuan agar para ilmuwan “pemerintah” dapat menghasilkan ilmu

²⁹ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27.

³⁰ Muhammad Fakhriansyah dan Intan Ranti Permatasari Patoni, Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930), *Jurnal Pendidikan Sejarah* (Vol. 8, No. 2, 2019), hlm. 136.

pengetahuan yang berguna bagi pencapaian tujuan Politik Etis.³¹

4. Pengaruh Ilmu Pengetahuan bagi Masyarakat Pribumi

Ilmu Pengetahuan sebenarnya tidak dimulai dari nol di wilayah-wilayah yang menjadi jajahan negara Barat. Karena telah ada unsur sains dan teknologi yang telah dikembangkan secara lokal dan dapat dibangun di atasnya. Keberadaannya juga mengarah pada pembauran antara ilmu pengetahuan Barat dan lokal.³² Selain itu terdapat argumen bahwa unsur-unsur yang menjadi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi Barat ternyata juga berasal dari Asia. Mengingat sains dan teknologi telah berkembang secara mandiri di wilayah-wilayah yang menjadi koloni negara Barat atau perusahaan dagang Eropa, model lama *diffusionist* dalam penyebaran sains dan ilmu pengetahuan dari “Eropa” ke koloni-koloni sebagai penerima pasif menjadi tidak dapat dimungkinkan. Meskipun belum lama ini Ilmu Pengetahuan dari Barat dianggap sebagai entitas yang monolitik, baru-baru ini karakter sosial dan pluralitas budaya sains telah ditekankan bersama dengan karakter lokalnya.³³

Pada akhir abad ke-15 terdapat tiga faktor yang mengubah ilmu pengetahuan Eropa yaitu Kedatangan Portugis ke India, penemuan Benua "Amerika", Penemuan dan penyebaran Mesin Cetak yang dapat dipindah-pindah di Eropa. Hal ini terlihat ketika sebagian besar orang-orang Eropa pada tahun 1500-an tidak memiliki pengetahuan tentang benua di luar Eropa, namun perubahan terjadi sekitar tahun

³¹ Andrew Goss, *op.cit.*, hlm.131.

³² Robert DeKosky and Douglas Allchin, eds., *An Introduction to the History of Science in Non-Western Traditions* (Seattle: History of Science Society, 2008).

³³ Peter Boomgard, *Empire and Science in the Making: Dutch Scholarship in Comparative Global Perspective* (New York: Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 9.

1800-an di mana pengetahuan orang-orang Eropa terutama di kalangan menengah ke atas telah memiliki pengetahuan tentang di luar benua Eropa.³⁴ Dampak pengetahuan yang meningkat secara pesat bagi cendekiawan dan masyarakat Eropa menjadikan wilayah dan masyarakat di luar benua mereka tertarik untuk mereka ketahui. Ketika mereka mendapat pengetahuan tentang masyarakat (yang menurut mereka "primitif") seperti masyarakat di Afrika dan Pasifik malah membuat diri mereka merasa jauh lebih unggul (lebih tinggi derajatnya) di antara masyarakat Amerika, Asia, dan Afrika. Orang-orang Eropa menganggap peradaban Eropa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi merupakan yang tertinggi di antara peradaban yang lain. Sedangkan masyarakat selain mereka, terutama Afrika yang masih bersifat kesukuan sebagai peradaban yang rendah.³⁵

Di sisi lain, orang-orang Eropa juga terkesan dengan beberapa peradaban kuno yang ada di Asia. Beberapa pemikir Eropa berpendapat bahwa orang Eropa dapat belajar dari Sejarah Persia, India, dan Tiongkok.³⁶ Meningkatnya pengetahuan tentang kelompok masyarakat di luar Eropa bagi orang-orang Eropa justru membuat kecenderungan untuk menganggap ketidaksetaraan tertentu sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima juga meningkat. Seperti adanya perbudakan dan perdagangan budak (sekarang disebut perdagangan manusia) juga diperdebatkan. Jika semua prinsipnya setara, seharusnya tidak ada manusia yang boleh menjadi

³⁴ Peter Boomgard, *Ibid.*, hlm. 10.

³⁵ Christopher Bayly, *The Birth of the Modern World 1780–1914: Global Connections and Comparisons* (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), hlm. 106–19.

³⁶ Geoffrey C. Gunn, *First Globalization: The Eurasian Exchange, 1500–1800 (World Social Change)* (Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 2003), hlm. 145–168.

budak. Argumen ini kemudian meluas dengan pemikiran bahwa di mana suatu bangsa menguasai bangsa lain juga tidak diperbolehkan. Pemikiran ini juga menjadikan dasar Alexander von Humboldt, seorang intelektual pencerahan yang menentang kolonialisme.³⁷

B. DAMPAK BAGI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan manusia tentang alam, masyarakat, dan pikiran. Pengetahuan adalah komponen penting dari eksistensi manusia karena merupakan hasil dari aktivitas berfikir dan pemahaman yang dilakukan oleh manusia. Berpikir membedakan manusia dari jenis lainnya, seperti hewan. Ada dua jenis pengetahuan: empiris dan rasional.³⁸ Sedangkan pendidikan adalah bagian dari ilmu pengetahuan dan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk membantu atau membimbing siswa dalam mengembangkan potensi fisik dan rohani mereka untuk mencapai kedewasaan dan mencapai tujuan agar siswa dapat melakukan tugas hidupnya sendiri.³⁹

BGKW sebagai lembaga ilmu pengetahuan juga memiliki dampak penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia. BGKW memulai pengaruh dalam kebijakan pendidikan berawal dari pemenuhan kebutuhan para ahli yang didatangkan dari

³⁷ Aaron Sachs, *The Humboldt Current: Nineteenth-Century Exploration and the Roots of American Environmentalism* (London: Viking, 2006), hlm. 13.

³⁸ Dila Rukmi Octaviana dan Reza Aditya Ramadhani, Hakikat Manusia: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama, *Jurnal Tawadhu* (Vol. 5, No. 2, 2021), hlm.148.; Paulus Wahana, *Filsafat Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Diamon, 2016), hlm. 46-47.

³⁹ Abdillah Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengebangan Pendidikan Indonesia, 2019), hlm. 24.

Belanda untuk mengkaji pendidikan di wilayah koloni dan membuka sekolah di Hindia Belanda hingga menjadi penasihat pemerintah dalam kebijakan mengenai pendidikan di tanah koloni.

1. Pengaruh dalam Kebijakan Pendidikan

Permasalahan pendidikan di tanah koloni Hindia Belanda sejak kehadiran VOC hingga pemerintah Hindia Belanda memang sudah cukup kompleks. Bukan hanya pendidikan bagi kaum pribumi, namun pendidikan bagi para penduduk koloni dari Belanda yang menetap di Hindia Belanda juga belum terlalu diperhatikan. Padahal BGKW sebagai perkumpulan masyarakat ilmiah memiliki motto “untuk kepentingan publik”.⁴⁰ Sejak pendiriannya, BGKW memulai tugas penting dalam pencerahan ilmu pengetahuan untuk masyarakat terutama dalam hal pendidikan.

Gubernur Jenderal VOC Reynier de Klerk pada 10 April 1778 mengeluarkan sebuah kebijakan pendidikan dari sebuah perkumpulan BGKW yang baru berdiri ini. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan standar mutu sekolah-sekolah yang berdiri di Batavia. Kebijakan ini merupakan lompatan di bidang pendidikan di bawah pemerintah VOC pada masanya (akhir abad ke-18). Untuk pertama kalinya terdapat upaya untuk memberikan aturan mengenai materi pelajaran dan metode pengajaran (semacam kurikulum) di Hindia Belanda.⁴¹

⁴⁰ Endang Sri Hardianti dkk., *op.cit.* hlm. 45.

⁴¹ Izaak Johannes Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie* (Groningen-Batavia: Bij J. B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij, 1938), hlm. 40.

Pada 1780 perkumpulan masyarakat ilmiah Haarlem (HMW) mengadakan sayembara ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan mencari cara yang paling baik mengenai pendidikan bagi masyarakat di Batavia, Hindia Belanda. “Apa yang paling cocok untuk mengembangkan pikiran mereka dan membuat mereka juga mahir dalam seni dan ilmu pengetahuan yang berguna sekaligus menanam dalam mereka moral dan karakter yang baik?”.⁴² Dari BGKW juga mulai membuat sebuah riset-riset awal untuk mengetahui sebelum akhir tahun 1783 sarana apa yang paling cocok guna meningkatkan pendidikan alam dan moral anak-anak di tanah koloni ini. Tentu saja dengan memberikan beberapa hal tentang bagaimana anak-anak dapat belajar bahasa Belanda di Hindia Belanda dan bagaimana guru-guru yang kompeten dapat dilatih.⁴³ Atas dasar kepentingan dan cita-cita yang sama, BGKW kemudian menjadi penasihat dan mitra pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan, saran dan kritik yang berkaitan dengan pendidikan, seni, dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda.

Salah satu kebijakan yang diinisiasi oleh BGKW adalah saran K.F. Holle yang mendesak pemerintah kolonial agar semua publikasi nasional yang diterbitkan pemerintahan dapat tersedia secara umum. Saran tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kolonial dengan membuat sebuah keputusan pada 23 Maret 1863.⁴⁴ Usulan peningkatan kualitas pendidikan di Batavia juga mulai dilakukan oleh Van Hoevell, pemimpin BGKW (1846-1848) yang mendesak pemerintah untuk

⁴² VBG Deel III, 1781, hlm.3.

⁴³ Brugmans, *ibid.*, hlm. 58.

⁴⁴ J. A. Van der Chijs, *Tijdschrift Bataviaasch Genootschap (TBG) Deel XVI* (1867), hlm. 62.

membuat fasilitas pendidikan untuk kaum kolonial yang akan menjadi pegawai negeri di Batavia tanpa perlu harus ke Belanda.⁴⁵ Kegiatan ini berujung pada gerakan protes yang dikenal sebagai revolusi intelektual Batavia 1848.

2. Kurikulum, Buku Teks, dan Pembelajaran Sejarah

Dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan seperangkat program pendidikan yang disediakan oleh lembaga atau pemerintah bernama kurikulum. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.⁴⁶ Kurikulum adalah sesuatu yang harus diajarkan kepada peserta didik agar menguasai kompetensi atau kemampuan yang telah ditetapkan. Kurikulum juga merupakan agen perubahan budaya dan peradaban bangsa sehingga seringkali secara filosofis merupakan *transfer of culture* yang merupakan investasi peradaban.⁴⁷

Kurikulum yang memiliki kaitan erat dengan berbagai penelitian oleh BGKW sebagian besar adalah pembelajaran sejarah. Kurikulum untuk sejarah memiliki tujuan membentuk mentalitas para siswa dan mengembangkan kepercayaan siswa terhadap agama, budaya, dan identitas siswa.⁴⁸ Buku teks adalah bahan atau alat ajar yang berisi ilmu pengetahuan dari analisis kurikulum tertulis untuk mendukung

⁴⁵ Van Hoëvell, 'Geschiedkundig overzicht van de beoefening van kunsten en wetenschappen in Neêrland's Indië', *Tijdschrift voor Nedêrland's Indië (TNI) Deel 2* (Batavia: Lands-drukkerij, 1839), hlm.43.

⁴⁶ Oemar Hamalik, *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA*, (Bandung: Sinar Baru Alegginsindo, 2001), hlm. 65.

⁴⁷ Zulkarnain, *Kebijakan Kurikulum Sejarah Di Sekolah Menengah Atas, Disertasi*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 15.

⁴⁸ Saleh, *Developing History Curriculum: An Islamic Perspective. Intellectual Discourse* (Vol. 9, No.1, 2001), hlm. 86.

kurikulum.⁴⁹

Dalam kurikulum dan buku teks sejarah sejak masa kolonial hingga sekarang, BGKW memiliki andil dalam isi materi sejarah Indonesia pra kolonial. Materi-materi tentang Sejarah Kuno Indonesia banyak berisi dari berbagai hasil penelitian sejarah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda khususnya para peneliti BGKW. Kurikulum dan buku teks hingga saat ini dalam materi sejarah di sekolah tentang Kutai sebagai kerajaan pertama dan tertua di Indonesia didasarkan pada riset-riset yang didapatkan BGKW tentang penemuan arca di daerah Kalimantan Timur oleh K.F. Holle.⁵⁰ Yupa ini kemudian dibawa ke Batavia dan diteliti oleh Johan Hendrik Caspar Kern, seorang arkeolog BGKW.⁵¹ Prasasti Yupa ditemukan di Bukit Beribus di Muara Kaman di pedalaman Sungai Mahakam pada tahun 1879..

Materi pelajaran sejarah yang juga penting adalah pembahasan tentang eksistensi kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Bukti ini didasarkan pada prasasti kedukan bukit, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Talang Tuo yang dibawa ke Museum BGKW.⁵² Prasasti Kota Kapur pertama dilaporkan oleh J.K. van der Meulen, pegawai kolonial di pulau Bangka pada Desember 1892. Merespon laporan tersebut, BGKW mengutus seorang peneliti

⁴⁹ Sunendar dan Wasid. *Strategi Pembelajaran Bahasa* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2008), hlm. 172.

⁵⁰ Omar Mohtar, "Tujuh Prasasti Yupa Digurat Mengiringi Fajar Sejarah Nusantara", *Tirto.id*, <https://tirto.id/tujuh-prasasti-yupa-digurat-mengiringi-fajar-sejarah-nusantara-gRkq> diakses 12 Desember 2023

⁵¹ Boechari, *Prasasti Koleksi Museum Nasional, Jilid I*. (Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional, 1985).

⁵² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Indonesia Kelas X*. Edisi Revisi (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 87-89.

yang juga meneliti prasasti Yupa yakni Johan Hendrik Caspar Kern. Penelitian tentang prasasti ini dan dapat ditemukan dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië* dengan artikel berjudul *Inscriptie van Kota Kapur*.⁵³

Prasasti Ciareteun, yang sekarang menjadi koleksi museum nasional, ditemukan pada tahun 1863 dari laporan yang ditunjukkan kepada BGKW. Prasasti Tugu pertama kali disebutkan dalam laporan Notulen Bataviaasch Genootschap pada tahun 1879.⁵⁴ Guna membahas penemuan Prasasti Tugu, BGKW mengadakan pertemuan pimpinan pada 4 Maret 1879. Dalam pertemuan itu, J.A. van der Chijs mengusulkan agar batu prasasti dipindahkan ke museum. Atas inisiatif P. de la Faille Roo, prasasti ini ditransfer ke Museum BGKW pada tahun 1911 dan diberi nomor inventaris D.124. Di sekolah-sekolah, kedua prasasti tersebut dimasukkan sebagai bukti sejarah keberadaan Kerajaan Tarumanegara.⁵⁵

Pembelajaran dalam buku teks sejarah tentang materi kerajaan Majapahit juga banyak didasarkan dalam berbagai temuan naskah dan koleksi kuno BGKW. Salah satunya penemuan naskah Negarakertagama oleh peneliti BGKW, JL Brandes ketika mengikuti ekspedisi militer di Lombok pada tahun 1894. Naskah lain yang menguatkan keberadaan Majapahit adalah penemuan naskah Serat Pararaton. Berkaitan dengan Serat Pararaton, Brandes kemudian melakukan penelitian dan

⁵³ Kern, H. 1913. "Inscriptie van Kota Kapur (eiland Bangka; 608 Çāka)", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 67: 393-400.

⁵⁴ ANRI, KBG Dir 0396.

⁵⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *op.cit.*, hlm. 90.

menerbitkan publikasi berjudul “VBG” dalam VBG Deel XLIX yang terbit tahun 1896.⁵⁶

Selain materi pembelajaran sejarah kuno, materi tentang manusia purba dan kepurbakalaan Indonesia di sekolah juga banyak didasarkan oleh penelitian yang terbit dari publikasi ilmiah. Salah satu penelitian BGKW yang masuk dalam buku teks Sejarah Sekolah Menengah Atas di Indonesia yang terbit tahun 2019 adalah penelitian Eugene Dubois tentang Manusia Purba Jawa yang ditemukan di Sangiran.⁵⁷

Berbagai teori dalam materi sejarah di Sekolah Menengah Pertama seperti teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara juga didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti BGKW. Beberapa teori tersebut adalah Waisya yang diteliti oleh N.J. Kroom, Brahmana yang diteliti oleh J.C. Van Leur, ksatria yang dikemukakan oleh J.L. Moens dan arus balik yang dicetuskan FDK Bosch.⁵⁸

3. Perintis Pendidikan Tinggi Pertama di Hindia Belanda

Pendidikan Tinggi di Hindia Belanda pada abad ke-19 cukup tertinggal di antara negara-negara Asia lain. Hingga awal abad ke-20, belum ada perguruan tinggi resmi yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Masyarakat Hindia Belanda harus berpergian ke luar negeri terutama Belanda untuk menikmati pendidikan

⁵⁶ VBG Deel LXIX, 1896.

⁵⁷ Arthur Keith, Pithecanthropus Erectus: A Brief Review Of Human Fossil Remains, *Science Progres*, (Vol. 3, No. 17, 1895), hlm. 348-389.

⁵⁸ Nofiyah Mardiani, dkk. Materi Sejarah Masa Hindu-Buddha dan Penggunaan Sumber Belajar Sejarah dalam Pembelajarannya di SMK, *Tamaddun* (Vol. 7, No. 02, 2019), hlm. 333-334.

tinggi dan mendapatkan gelar akademik. Usulan didirikannya perguruan tinggi atau universitas di Hindia Belanda sebenarnya telah lama diusulkan oleh perkumpulan masyarakat ilmiah BGKW.⁵⁹ Mimpi masyarakat ilmiah di Hindia Belanda untuk memiliki perguruan tinggi mulai perlahan terwujud.

Pendidikan tinggi pertama kali diterapkan di Hindia Belanda berawal dari kebutuhan tenaga kesehatan yang terbatas. Pendirian sekolah ini adalah gagasan dari Kepala Jawatan Kesehatan yang pada saat di itu dipimpin oleh W. Bosh agar dapat melatih beberapa anak bumiputera dalam membantu para dokter Belanda. Pada awalnya sekolah yang disebut *sekolah dokter djawa* bertujuan untuk membantu dokter untuk membantu memberantas wabah penyakit cacar.⁶⁰ Tentu saja pelajaran yang dibahas yaitu mengenai cara mengobati cacar dan memberikan bantuan pertama kepada pasien yang demam serta sakit perut. Bahasa yang digunakan yaitu dengan Bahasa Melayu. *Sekolah Dokter Djawa* akhirnya dapat meluluskan 11 muridnya serta mendapat gelar sebagai Dokter Jawa pada 5 Juni 1853.

Pada tahun 1909 telah dibentuk suatu perkumpulan bernama *Indische Universiteit Vereniging*, yang berarti suatu kelompok yang akan mendukung pembentukan sebuah universitas di Hindia Belanda. Banyak didukung oleh orang Indo-Belanda yang akan tinggal di Hindia Belanda, tetapi upaya tersebut gagal.⁶¹ Sebuah panitia dibentuk pada tahun 1913 untuk memberikan rekomendasi kepada

⁵⁹ ANRI, KBG Varia 0015.

⁶⁰ Ririn Darini, dkk., Pelayanan dan Sarana Kesehatan Di Jawa Abad XX, *Mozaik* (Vol. 5, 2015), hlm. 3

⁶¹ Naufal Shidqi Laras, Sejarah Perguruan Tinggi di Indonesia, *Makalah* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2020), hlm. 4

pemerintah kolonial tentang cara mendirikan sebuah universitas. Namun, laporan tersebut menyatakan bahwa rencana yang diusulkan tersebut belum siap untuk diterapkan. Apakah pribumi memiliki tingkat pendidikan ilmu pengetahuan yang sebanding dengan orang Eropa masih terdapat keraguan mengenai hal tersebut.⁶²

Dengan *Hooger Onderwijs Wet 1905* yang ditetapkan oleh Ratu Wilhelmina, universitas harus memiliki lima fakultas untuk dianggap sebagai institusi pendidikan tinggi. Perkumpulan Hindia Belanda di Den Haag menginisiasi gagasan pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 1910 dan pada tahun yang sama juga didirikan *Indische Universiteit Vereeniging* (IUV).⁶³ Tujuan dari IUV ini adalah untuk membangun institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Inisiatif ini awalnya berasal dari orang Indo-Eropa, tetapi kemudian didukung oleh orang Indonesia yang mengikuti Mr. Conrad Theodore van Deventer (*etische koers*). Pada dasar ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda berencana mendirikan sebuah universitas (*Universiteit van Nederlandsch Indie*) sebelum Perang Dunia Kedua (1938–1939) tetapi karena timbul perang Pasifik dan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang (12 Maret 1942).⁶⁴

Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi mendirikan perguruan tinggi pertama di Hindia Belanda. Pada tahun 1920, *Technische Hooge School* di Bandung didirikan sebagai perguruan tinggi. Pendirian itu diperlukan karena kebutuhan akan

⁶² “Surat Direktur Pendidikan dan Agama G.A.J Hazeu kepada Gubernur Jenderal Idenburg” tanggal 27 November 1914 No. 23814 dalam *Ibid.* hlm. 3.

⁶³ Irsyam, T. W. M., Oemaryati, B. S., & Somadikarta, S. *Tahun emas Universitas Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2000).

⁶⁴ Mada Sutapa, dkk. Analisis Competitive Advantage Pendidikan Belanda Dan Jepang. *Laporan Penelitian Pusat Studi Kawasan*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), hlm. 3.

tenaga ahli yang berpendidikan tinggi.⁶⁵ Sebelum THS didirikan di Bandung pada tahun 1920, telah ada perguruan tinggi jenis ini. Sebuah Perguruan Tinggi Teknik di Batavia yang didirikan sebagai persiapan untuk peresmiannya.⁶⁶

C. DAMPAK BAGI PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

Pengetahuan, kekayaan mental, memperkaya kehidupan masyarakat. Pengetahuan hakikatnya adalah semua yang kita ketahui tentang sesuatu. Pengetahuan mencakup semua yang diketahui sehingga bisa berasal dari agama, cerita mitologi, atau ilmu pengetahuan ilmiah.⁶⁷ Pengetahuan adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam definisi lain, pengetahuan adalah semua pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia, termasuk manusia dan kehidupan mereka.⁶⁸

BGKW sebagai perkumpulan masyarakat ilmiah dan institusi ilmu pengetahuan pertama memiliki pengaruh penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda.⁶⁹ BGKW menerbitkan jurnal ilmu pengetahuan pertama bernama “*Verhandelingen*” pada tahun 1779. Jurnal itu berisi berbagai ilmu pengetahuan praktis, sebagian lain membahas etnografi dan sejarah Jawa.⁷⁰ BGKW menjadi sebagai salah satu perkumpulan masyarakat ilmiah pertama di luar Eropa dan pertama di Asia bersamaan dengan *Asiatic Society* yang berdiri tahun

⁶⁵ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 142.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Jujun S. Surismantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), hlm. 104.

⁶⁸ Alexander Sonny Keraf dan Mikhael Du'a, *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Jakarta: Kanisius, 2001), hlm. 22.

⁶⁹ Endang Sri Hardianti dkk., *op.cit.*, hlm. 45.

⁷⁰ Hans Groot, *op.cit.*, hlm. 115.

1784 di Kalkuta, India Britania. BGKW menjadi tempat berkumpul, bersosialisasi dan berdiskusi bagi kalangan orang-orang Belanda yang kaya dan pernah mengenyam pendidikan dari Belanda.⁷¹

1. Perintis Institusi Ilmu Pengetahuan di Indonesia

Kelembagaan ilmu pengetahuan di wilayah kolonial pertama kali dirintis oleh JCM. Radermacher dengan berdirinya dua organisasi pencerahan yaitu *Vrijmetselarij* dan BGKW. *Vrijmetselarij* bukanlah institusi ilmiah namun semacam komunitas elit persaudaraan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan spritual.⁷² Sedangkan BGKW merupakan perkumpulan masyarakat ilmiah seperti halnya HMW di Haarlem dan *British Society* di London. Perkumpulan BGKW berfokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai metode-metode ilmiah dan empiris berlandaskan pengaruh pencerahan dari Eropa.⁷³

BGKW telah melakukan berbagai riset dan menghasilkan berbagai inovasi dalam kapasitasnya sebagai institusi ilmiah. Hasil riset dan inovasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui berbagai jurnal dan majalah ilmiah yang diterbitkan oleh BGKW. Sebagian besar hasil riset lebih banyak membahas dalam lingkup Sosial dan Humaniora. Sedangkan untuk urusan ilmu alam pada pertengahan abad ke-19 mulai dilimpahkan ke *Natuurkundige Vereeniging in Nederlandsch Indië*.⁷⁴

⁷¹ Jean Gelman Taylor, *op.cit.*, hlm. 155.

⁷² Tri Ilham Pramudya, Hubungan *Vrijmetselarij* dan Elit Pribumi di Jawa (1908-1962), *Skripsi* (Depok: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 39.

⁷³ Hans Groot, *op.cit.*, hlm. 115.

⁷⁴ Endang Sri Hardianti dkk., *op.cit.*, hlm. 10.

Perkembangan institusi ilmiah di Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dari insitituti BGKW. Meski pada awalnya berbentuk perkumpulan masyarakat ilmiah, BGKW seiring berjalanya waktu mulai menjadi salah satu lembaga ilmu pengetahuan yang cukup diperhitungkan di Asia pada abad ke-19. BGKW tercatat melakukan berbagai korespondensi dan pertukaran publikasi dengan berbagai perkumpulan masyarakat ilmiah atau instansi ilmiah di seluruh dunia serta berbagai koleksi (naskah/benda sejarah) dari Nusantara tersebar di berbagai negara.⁷⁵ Kelembagaan ini kemudian menjadi salah satu corong utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan di Hindia Belanda.

BGKW sebagai perintis institusi ilmu pengetahuan di Hindia Belanda tidak terlalu mendominasi dalam penyebaran ilmu pengetahuan di wilayah ini. Pemerintah kolonial yang memiliki pengaruh terkuat dalam mengontrol perkembangan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda. Institusionalisasi ilmu pengetahuan sangat terasa selama periode kolonial. Hasilnya berbagai proyek ilmiah dan penelitian praktis sangat bergantung dalam program kerja pemerintah kolonial.

Dalam riwayatnya, BGKW baru naik statusnya menjadi institusi ilmiah yang diberi *Koninklijk* pada tahun 1923 dan mengalami beberapa kali perubahan struktural dalam organisasinya. Pada awalnya BGKW banyak berfokus pada ilmu alam, kesehatan, ilmu sosial, dan pertanian.⁷⁶ Pada 1840-an, di bawah kepemimpinan Van Hoevell, BGKW mulai fokus pada bidang ilmu sosial dan

⁷⁵ Peter Boomgard, *op.cit.*, hlm. 18.

⁷⁶ Endang Sri Hardianti dkk., *op.cit.*, hlm. 10.

humaniora, sedangkan ilmu alam, kesehatan, geologi, dan pertanian mulai dihibahkan ke institusi lain. Bidang-bidang sosial humaniora ini kemudian terbagi lagi dalam beberapa kelompok atau afdeling seperti *Afdeeling Adatreacht* (Bagian Hukum Adat), *Afdeeling Taal-, Land-En Volkenkunde* (Bagian Antropologi dan Bahasa), *Afdeeling Rechtswetenschap* (Bagian Hukum), *Afdeeling Staathuishoudkunde* (Bagian Ekonomi) atau *Afdeeling Sociale Econimie* (Bagian Sosial Ekonomi), *Afdeeling Studie Internationale Vraagstukken* (Bagian Kajian Politik Internasional), dan *Afdeeling geschiiedenis* (Bagian Sejarah).⁷⁷

Kelembagaan BGKW mencakup dalam museum dan perpustakaan yang menjadi rumah bagi berbagai koleksi benda dan naskah kuno.⁷⁸ Berbagai koleksi ini terkumpul dari seluruh Hindia Belanda. Museum dan Perpustakaan BGKW menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.⁷⁹ Koleksi-koleksi kuno yang dimiliki BGKW juga dikirim ke berbagai negara Eropa terutama Belanda, kelak di masa depan akan menimbulkan permasalahan baru dalam usaha repatriasi benda-benda tersebut.⁸⁰

Perkembangan kelembagaan BGKW sepanjang abad ke-19 tidak terlalu banyak berubah selain beberapa perubahan bagian di internal BGKW seperti

⁷⁷ Jaap Erkelens, *Inventaris Arsip Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (KBG) (1778-1962)* (Jakarta: Arsip Nasional RI, 2003).

⁷⁸ Betsy Hutapea, "Koleksi Perpustakaan Museum Pusat sebagai salah satu inti koleksi Perpustakaan Nasional," *Skripsi* (Depok: Jurusan S1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, 1978).

⁷⁹ Bagus Dwi Bramantyo dan Pitoyo Ismail, Digital Tourism Museum Nasional Indonesia Melalui Virtual Tour Di Masa Pandemi Covid-19, *Bramantyo* (Vol. 20, No. 2, 2021), hlm. 189.

⁸⁰ Museum Nasional, *Katalog Pameran Warisan Budaya Bersama* (Jakarta: Museum Nasional, 2005), hlm. 1-3.

afdeling. Pada 1923, BGKW mendapatkan predikat/institusi setaraf *koninklijke* (kerajaan). BGKW mendapatkan nama lengkapnya menjadi *Koninklijke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (KBG).⁸¹ Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), kegiatan BGKW tetap berjalan di buktikan dengan keberadaan sebuah arsip di ANRI berkode KBG Varia 0044 yang berisi laporan mingguan oleh sekretaris KBG (Th.a Th. Van der Hoop) kepada K. Kinoshita, pegawai di Departemen Pendidikan pemerintah pendudukan Jepang mengenai kegiatan KBG selama periode September-Desember 1942 dan Januari-Maret 1943.⁸²

Setelah masa kemerdekaan, BGKW masih menjadi lembaga swasta dan mendapatkan tambahan nama “Lembaga Kebudayaan Indonesia” sehingga namanya menjadi *Lembaga Kebudayaan Indonesia “Bataviaasch Genootchap Van Kunsten En Wetenschappen”*.⁸³ Baru pada tahun 1956 tercatat terdapat sebuah rapat internal membahas tentang penyerahan museum BGKW kepada pemerintah Republik Indonesia.⁸⁴ BGKW secara resmi di nasionalisasi menjadi bagian pemerintah Republik Indonesia pada 17 September 1962 dan BGKW resmi dibubarkan serta beralih fungsi menjadi Museum Pusat beserta Museum Perpustakaan Pusat di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁸⁵ Pada 28 Mei 1979, Museum Pusat berganti nama menjadi Museum Nasional dan

⁸¹ Hans Groot, *op.cit.*, hlm. 425.

⁸² ANRI, KBG Varia 0044.

⁸³ Jaap Erkelens, *op.cit.*, hlm.4,

⁸⁴ ANRI, KBG Dir 0979.

⁸⁵ Anne Putri Yusiani, *Pedagogi Museum di Indonesia: Studi Kasus Museum Nasional*, Tesis (Depok: Universitas Indonesia, 2010), hlm.51.

Perpustakaan Museum Nasional.⁸⁶

Perkembangan Perpustakaan Museum Nasional lebih berkembang lagi ketika masa Orde Baru, Seiring menguatnya rencana pembentukan Perpustakaan Nasional sejak tahun 1967.⁸⁷ Rencana ini dipelopori langsung oleh Mastini Hardjoprakoso, Kepala Perpustakaan Museum Nasional dan berkat dukungan dari berbagai pihak terutama Selo Sumardjan dan tim. Maka pada 17 Mei 1980, diresmikanlah Perpustakaan Nasional Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang Perpustakaan sejajar dengan Museum Nasional Indonesia sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang Permuseuman di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁸⁸ Perpustakaan Nasional Indonesia merupakan peningkatan status yang sebelumnya bernama Pusat Pembinaan Perpustakaan (1975-1980) sebelumnya lagi bernama lembaga perpustakaan (1965-1975) penggabungan dari perpustakaan museum nasional, perpustakaan sejarah, politik dan sosial, perpustakaan wilayah DKI Jakarta dan Kantor Bibliografi Nasional.⁸⁹

Pada 1989, Perpustakaan Nasional Indonesia meningkat statusnya menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).⁹⁰ Perubahan status ini menjadikan Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga vertikal membawahi perpustakaan

⁸⁶ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 92 Tahun 1979. ; Direktorat Permuseuman, *Sejarah Permuseuman di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2011), hlm. 64.

⁸⁷ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 95 Tahun 1967.

⁸⁸ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.164 Tahun 1980.

⁸⁹ Sulistyio Basuki, *Sejarah Perpustakaan Nasional RI: Sebuah Kajian* (Jakarta:Perpustakaan Nasional, 2008).

⁹⁰ Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional.

daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Mastini Hardjoprakoso menjadi Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pertama saat menjadi UPT di lingkungan Depdikbud (1980 – 1989) sekaligus sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah Perpusnas menjadi LPND atau sejajar Mendikbud (1989 – 1998).⁹¹

Berbeda dengan Perpustakaan Nasional menjadi LPND sejak 1989, Museum Nasional sebelumnya Museum Pusat sejak 1962 masih berstatus Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Permuseuman di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁹² Perkembangan terbaru pada tahun 2022 statusnya naik setelah 60 tahun berstatus UPT menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.⁹³ Perkembangan lembaga Museum Nasional masih terus berlanjut seiring dinamika yang terjadi hingga hari ini bahkan ketika penelitian ini sedang berjalan (2021-2023).

Perkembangan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) merupakan penggabungan beberapa instansi seperti LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN berakar dari sebuah lembaga *S'Lands Plantentuin te Buitenzorg* (dikenal sebagai Kebun Raya Bogor) berdiri 1817 termasuk di dalamnya *Herbarium Bogoriense* yang didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1889. Pada tahun

⁹¹Porwanto. *Konsepsi Pemikiran Kepustakawanan Mastini hardjoprakoso. Skripsi.* (Jakarta : Univeversitas Indonesia, 2004).

⁹² Amir Sutaarga, *Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Museum* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cet.4, 1997), hlm. 21.

⁹³ Permendikbudristek No. 28 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Museum Dan Cagar Budaya.

1928, lembaga ini dibentuk menjadi *Natuurwetenschappelijk raad voor Nederlandsch Indie*. Pada tahun 1948, lembaga ini berubah menjadi *Organisatie voor Natuurwetenschappelijk onderzoek* (Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam, atau OPIPA).⁹⁴

Pada tahun 1956, pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 6 Tahun 1956 dan membentuk Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Pada tahun 1966, pemerintah juga mendirikan Departemen Urusan Riset Nasional (DURENAS), yang kemudian berubah menjadi Lembaga Riset Nasional (LEMRENAS) sebelum berubah menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1967.⁹⁵ Pada masa kepresidenan Soekarno, Lembaga Tenaga Atom Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdiri tahun 1958 dan 1963, disusul Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada masa kepresidenan Soeharto, BPPT berdiri pada 1974 dan dipimpin langsung oleh B.J. Habibie.⁹⁶

Sejarah institusi ilmu pengetahuan di Indonesia pada akhirnya terbagi dalam beberapa poros sejarah yang berbeda antara sejarah yang berawal dari Perkumpulan Masyarakat Ilmiah BGKW, lembaga swasta masa kolonial di Batavia kelak menjadi Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional, *S'Lands Plantentuin* (Kebun Raya), lembaga negara masa kolonial di Bogor dan institusi-institusi ilmu pengetahuan

⁹⁴ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *50 Tahun Kiprah LIPI untuk Bangsa* (Jakarta: LIPI Press, 2017), hlm. 8.

⁹⁵ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *op.cit.*, hlm. 10-14.

⁹⁶ Agus Supriyanto dan Surya Pratama, *Gelombang Transformasi Teknologi Nasional* (Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2018), hlm. 60- 71.

yang baru dibentuk sebagai lembaga negara setelah kemerdekaan kelak menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Institut Pertanian Bogor.

2. Gagasan Historiografi Kolonial dan Pengaruhnya dalam Penelitian Sejarah Indonesia

Penelitian sejarah secara ilmiah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti BGKW. Ilmu Sejarah menjadi salah satu fokus utama dalam produksi ilmu pengetahuan pada masa kolonial. Dalam *Programma van Het Bataviaasch Genootschap*, sejarah alam menjadi tujuan dalam berbagai kegiatan seperti diskusi, penelitian literatur, dan berbagai kompetisi. Dari berbagai kegiatan tersebut muncul penulisan sejarah menggunakan perspektif orang-orang Eropa yang mempelajari sejarah di kepulauan Hindia.

Penulisan sejarah oleh orang-orang Barat di masa kolonial ini dikenal sebagai Historiografi Kolonial. Mereka menggunakan perspektif Barat yang Belanda-sentris sebagai koloni yang menduduki tanah jajahan untuk hidup dan berkembang sebagai sebuah masyarakat ideal. BGKW menjadi salah satu tempat di mana banyak memproduksi pengetahuan dan penelitian yang menggunakan historiografi kolonial. Salah satu bentuk paling menonjol dalam historiografi ini adalah penelitian yang berjudul *Geschiedenis van Nederlandsch Indie* disusun F.W. Stapel.⁹⁷ Sejarawan F.W. Stapel juga turut menulis di majalah ilmiah BGKW, *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*

⁹⁷ Ahmad Choirul Rofiq, *Menelaah Historiografi Nasional Indonesia: Kajian Kritis Terhadap Buku Indonesia dalam Arus Sejarah* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 17.

(TBG) berjudul “De Ambonsche 'Moord’” atau Genosida Ambon terbit 1923.⁹⁸

Arsiparis dan sejarawan Hindia Belanda adalah yang pertama kali mengembangkan historiografi kolonial. Historiografi kolonial dikenal sebagai historiografi Belanda-sentris. J.K.J. De Jonge dan F. de Han, arsiparis Negara di Batavia adalah tokoh penting dalam historiografi kolonial ini. Historiografi yang digagas oleh De Jonge dan F. De Han berusaha membentuk sejarah ilmiah berdasarkan arsip-arsip kolonial yang berpusat di Batavia. Proses historiografi kolonial yang dilakukan Jonge dan De Han membentuk madzhab yang dikenal sebagai mazhab Batavia dalam sejarah historiografi di Hindia Belanda.⁹⁹

Pembahasan dalam *Geschiedenis van Nederlandsch Indie* diawali dengan pembahasan prasejarah di Nusantara yang ditulis Van der Hoop dan dilanjutkan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang ditulis N.J. Krom. Sejarawan R.A. Kern menulis sejarah kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara sebagai kelanjutannya di jilid pertama. Sebagai hasil dari fakta bahwa pembahasan selanjutnya sebagian besar berpusat di Jawa, tidak mengherankan bahwa jilid kedua, *Javaansche Geschiedschrijving* disusun Cornelis Christian Berg, mendapat perhatian khusus untuk jilid kedua.¹⁰⁰

Pembahasan buku ini dimulai dengan kedatangan negara-negara Eropa. C. Wessels S.J. menulis "Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol", dan H. Terpstra

⁹⁸ F.W. Stapel, *De Ambonsche 'Moord'*, *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap (TBG)*, Deel LXII (Batavia & The Hague: BGKW, 1923), hlm. 224.

⁹⁹ H.J. De Graaf, *Historiografi Hindia Belanda* (Jakarta: Bhratara, 1971), hlm. 13.

¹⁰⁰ Abdul Syukur, *Historiografi Belandasentris: Pembentukan dan Perkembangannya*, *Jurnal Sejarah Lontar* (Vol.7, No.2, 2010), hlm. 47.

menulis "Kedatangan bangsa Perancis, Inggris, dan Belanda." Setelah itu, diskusi historiografi ini lebih berkonsentrasi pada upaya Belanda untuk membangun wilayah koloni Hindia Belanda sekitar abad ke-17 melalui pembentukan VOC, yang ditulis oleh F.W. Stapel, dan sebagai jilid keempat oleh E.C. Godee Molsbergen. Pada abad ke-18, diskusi juga berfokus pada bangsa Eropa karena pergantian pemerintahan dari Belanda ke Perancis, dari Perancis ke Inggris, dan dari Inggris ke Belanda kembali. I.J. Brugmans menulis jilid keenam tentang zaman modern, atau abad kedua puluh, tetapi tidak selesai karena pasukan Jepang mengambil alih Hindia Belanda pada bulan Maret 1942.¹⁰¹

Periodisasi sejarah yang ada dalam buku *Geschiedenis van Nederlandsch Indie* masih bertahan hingga sekarang termasuk dalam kurikulum sejarah di sekolah. FW Stapel memang banyak menulis buku sejarah selama hidupnya untuk membantu pendidikan sejarah di sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Sampai saat ini, buku *Geschiedenis van Nederlandsch Indie* dianggap sebagai “titik tertinggi dalam historiografi kolonial Belanda.”¹⁰²

Sebagian besar sejarah kolonial ditulis dari perspektif Eropa (Eropasentris) dan Belanda (Belandasentris). Dalam pandangan ini, negara-negara Eropa, terutama Belanda, dianggap sebagai pencipta peradaban yang membawa pencerahan dan kemajuan. Sebagai hasil dari penelitian dan arsip yang ada, historiografi ini menunjukkan bahwa penulisan sejarah didominasi oleh kegiatan

¹⁰¹ Abdul Syukur, *op.cit.*, hlm. 48.

¹⁰² Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, dan Ratna Saptari, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: OBOR dan KITLV – Jakarta, 2008), hal. 6.

bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda, karena kegiatan tersebut ditulis dan dijadikan arsip. Kegiatan bangsa Indonesia jarang tertulis dalam historiografi kolonial.

Setelah merdeka pada tahun 1945, kebutuhan untuk mengubah perspektif penulisan sejarah yang dominan dipengaruhi Barat mulai digantikan. Penulisan sejarah pada masa kolonial banyak terfokus pada orang-orang Belanda di Hindia Belanda atau Eropa. Hanya sebagian kecil yang melakukan penulisan sejarah tentang penduduk Indonesia asli namun masih menggunakan perspektif Barat. Tulisan sejarah pribumi tersebut ditulis oleh J.C. Van Leur dari geladak kapal. Dibutuhkan pemikiran untuk menulis sejarah oleh pribumi Indonesia sendiri, *history from within*.¹⁰³

3. Dekolonisasi Pengetahuan dan Warisan Pascakolonial

Dalam sebuah studi pascakolonial, membahas bagaimana sebuah negara dibentuk, mulai dari fase dekolonialisasi hingga saat ini, atau bagaimana sebuah negara kolonial berubah menjadi negara independen tetapi tetap dalam praktik pemikiran kolonialisme.¹⁰⁴ Pascakolonial menjadi dampak terpenting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, sebelumnya bernama Hindia Belanda. Diskursus ilmu pengetahuan ini jarang dibahas oleh sejarawan-sejarawan Indonesia padahal memberikan dampak nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat yang masih terpenjara dalam pemikiran-pemikiran

¹⁰³ Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, *Menggugat Historiografi Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 80.

¹⁰⁴ Wasisto Raharjo Jati, Mengurai Gagasan Negara Pascakolonial: Kontekstualisasi Indonesia Sebagai Negara Dunia Ketiga, *Masyarakat Indonesia* (Vol. 39, No. 1, 2013), hlm. 135.

kolonialisme.

Kolonialisme akademis sama dengan penjajahan ekonomi dan politik. Akibatnya, negara-negara yang pernah dikolonisasi harus bekerja keras untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dunia akademis yang terjajah terjadi ketika negara-negara kolonial berusaha untuk mengontrol kemajuan ilmu pengetahuan di wilayah mereka. Mereka menciptakan sistem ketergantungan akademis dan mencoba memonopoli pemahaman ilmiah untuk kepentingan kolonialisme.¹⁰⁵ Keberhasilan Indonesia dalam meraih kemerdekaan, mengubah paradigma kolonialisme berusaha melakukan perubahan signifikan dalam sistem pengetahuan di Indonesia. Paradigma Barat sebagai kiblat ilmu pengetahuan ternyata belum berubah hingga saat ini.¹⁰⁶

Kolonialisme memiliki pengaruh besar dalam sejarah produksi ilmu pengetahuan. Berbagai konsepsi ilmu pengetahuan banyak berasal dari Eropa meskipun sebagian juga berasal dari luar Eropa namun diproduksi kembali di Eropa dan menjadi sebuah pengetahuan dari Eropa. Orang-orang Eropa pada awal abad kelima belas dan keenam belas banyak berpetualang ke Asia, Amerika, dan Afrika membuka banyak berbagai pengetahuan tentang masyarakat di luar Eropa. Petualangan orang-orang Eropa pada periode yang dikenal “Age of Discovery” ini bukanlah pertemuan pertama orang Eropa dengan Non Eropa tetapi berbagai laporan penjelajahan dan tulisan-tulisan yang ada menandai cara pemikiran baru

¹⁰⁵ Syed Farid Alatas, *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010) ; Ajat Sudrajat, dkk, *Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial Keindonesiaan* (Yogyakarta: FIS UNY, 2017), hlm. 20

¹⁰⁶ Ajat Sudrajat, dkk. *Ibid.*, hlm.106.

tentang hubungan Eropa dengan masyarakat di luar Eropa.¹⁰⁷

Sebagai salah satu pusat ilmu pengetahuan kolonial, BGKW menjadi simpul penyebaran ilmu pengetahuan Barat bagi masyarakat Hindia Belanda tak terkecuali masyarakat pribumi. Hal ini diperkuat dalam teori yang dikemukakan oleh George Basalla dalam esai yang berjudul “*The Spread of Western Science: A three-stage model describes the introduction of modern science into any non-European nation*”. Esai tersebut mengemukakan *transfer of knowledge* hanya dilakukan oleh satu arah saja.¹⁰⁸ Orang-orang Eropa melakukan kontak dengan penduduk pribumi untuk mendapat informasi ilmiah dan dikumpulkan hingga diolah menjadi ilmu barat. Selanjutnya, para ilmuwan Eropa mendirikan institusi-institusi ilmiah salah satunya BGKW dan mereplikasi seutuhnya riset-riset ilmiah yang biasa dilakukan di Eropa agar penelitiannya dapat dilakukan lebih efektif dan dekat dengan wilayah penelitiannya. Setelah kemerdekaan, ilmu-ilmu ini kemudian dikembangkan menjadi tradisi ilmiah tersendiri dan orang-orang pribumi yang mempelajari ilmu Barat ini justru dijadikan rujukan dan dianggap paripurna.¹⁰⁹

Kolonisasi pengetahuan secara masif dan sistematis selama periode kolonial membuat ilmu pengetahuan tergantung dan sangat dipengaruhi oleh peradaban Barat. Mengutip pernyataan sejarawan Wayan Jarrah Sastrawan (2023) dalam

¹⁰⁷ Ania Loomba, *Kolonialisme/Pascakolonialisme* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2020), hlm.84-104.

¹⁰⁸ George Basalla, “The Spread of Western Science”, *Science*, (Vol. 156, No. 3775, 1967), hlm. 611-622

¹⁰⁹ Irawan Santoso Suryo Basuki, “Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa penjajahan melupakan peran orang pribumi”, *The Conversation* (2022). <https://theconversation.com/bagaimana-perkembangan-ilmu-pengetahuan-pada-masa-penjajahan-melupakan-peran-orang-pribumi-141774> diakses pada 16 Desember 2023.

kuliah umum di Universitas Negeri Yogyakarta dengan tema peluang dan tantangan dalam kajian sejarah kuno Nusantara di abad ke-21. Pengetahuan seperti sejarah kuno yang diteorikan oleh peneliti kolonial di BGKW salah satunya NJ. Krom dan diteruskan George Coedes tentang sejarah Sriwijaya tidak serta-merta selesai dan sebenarnya masih berupa hipotesis namun dijadikan rujukan keilmuan oleh berbagai peneliti Indonesia masa kini akibat berbagai keterbatasan seperti keilmuan dan keahlian.¹¹⁰

Kondisi tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi sehingga memunculkan gagasan untuk membangun struktur pengetahuan sejalan dengan ide dekolonisasi pengetahuan untuk melepas dominasi ilmu pengetahuan Barat.¹¹¹ Tradisi ilmu pengetahuan setelah kemerdekaan yang dilakukan pemerintah dilakukan berdasarkan warisan ilmiah kolonial.¹¹² Warisan pascakolonial memainkan pengaruh penting dalam paradigma ilmu pengetahuan di Indonesia, tidak ada rujukan lain selain ilmu pengetahuan Barat sehingga seolah-olah pengetahuan modern hanya berpusat pada peradaban Barat.

Mentalitas kolonial banyak mewarisi praktik-praktik dalam memproduksi ilmu pengetahuan saat ini. Institusionalisasi dalam produksi ilmu pengetahuan

¹¹⁰ Wayan Jarrah Sastrawan, *Peluang Dan Tantangan Dalam Kajian Sejarah Kuno Nusantara Di Abad Ke-21, Kuliah Umum Prodi Ilmu Sejarah UNY* (Yogyakarta, November 2023).

¹¹¹ Fajri Siregar, *Dekolonisasi Sains: Pentingnya memerdekakan ilmu pengetahuan dari ketergantungan pada dunia Barat. The Conversation* (2022) <https://theconversation.com/dekolonisasi-sains-pentingnya-memerdekakan-ilmu-pengetahuan-dari-ketergantungan-pada-dunia-barat-178540> diakses pada 17 Desember 2023.

¹¹² Irawan Santoso Suryo Basuki, *Tak Selalu Menjadi “Dari Timur Ke Barat”*: Model Basalla Dan Pengetahuan Pertanian Di Hindia Belanda (1817-1942), *Patrawidya* (Vol.21, No.31, 2020), hlm. 347.

masih terjerat dalam bingkai institusi negara dan sepenuhnya menjadi program-program kerja pemerintah. Dalam sejarahnya praktik-praktik ini merupakan warisan kolonial yang terus bertahan sehingga produksi ilmu pengetahuan profesional sangat bergantung dan dibatasi oleh negara.

Hal yang sama juga terjadi dalam ilmu sejarah, pasca kemerdekaan terdapat keinginan untuk mengganti buku teks sejarah yang didominasi perspektif Belanda. Salah satu hal yang diubah adalah mengubah sudut pandang tentang suatu peristiwa jika pada masa kolonial banyak menyebut pelaku sejarah yang melawan Belanda disebut pemberontak, maka dalam perspektif Indonesia para pemberontak ini disebut sebagai pahlawan. Perubahan sebagai salah satu bentuk usaha dekolonisasi sejarah.¹¹³

4. Penemuan Benda Bersejarah Indonesia dan Usaha Repatriasi

Sejak abad ke-17, bangsa Belanda banyak melakukan ekspedisi militer dan penaklukan wilayah di kepulauan Hindia guna memperluas daerah jajahannya. Ekspedisi militer ini juga bersamaan dengan penemuan berbagai harta-benda yang dimiliki masyarakat setempat untuk dirampas dan dikirim ke Batavia dan Belanda. Benda-benda bersejarah Indonesia dengan berbagai cara telah tersebar di seluruh dunia, kebanyakan berpusat di Belanda. Berbagai benda-benda bersejarah tersebut kemudian menjadi koleksi museum di Belanda dan tersebar di beberapa museum negara-negara Eropa lain, seperti *British Museum* di Inggris dan *Florence Museum* di Italia, sebagian ada di Prancis, Belgia, Jerman, Swedia, serta beberapa museum

¹¹³ Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, *op.cit.*, hlm. 80.

di Amerika Serikat.¹¹⁴

Penemuan dan pengumpulan benda-benda bersejarah ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan pencerahan yang dimulai sejak abad ke-17. Pada masanya, orang-orang elit Eropa seperti bangsawan dan profesional gemar mengumpulkan berbagai benda-benda alam dan buatan untuk *curiosity cabinet* atau lemari pengetahuan.¹¹⁵ Benda-benda bersejarah yang ditemukan di situs atau kuil-kuil di kepulauan Hindia khususnya Jawa mulai menjadi koleksi orang-orang Eropa di Batavia dan sebagian lainnya di kirim ke Eropa. Salah satu lokasi pengumpulan dan penampungan benda-benda tersebut adalah BGKW. Pengumpulan benda-benda di BGKW diperkuat ketika pemerintah kolonial yang menjadikan Museum BGKW sebagai tempat pengumpulan benda-benda budaya dari seluruh Hindia Belanda.

Secara hukum, pada 1840 pemerintah kolonial membuat sebuah kebijakan bahwa candi dan artefak di Hindia Belanda sebagai properti publik dan di bawah kekuasaan negara kolonial, segala bentuk pemindahan dan penghancuran subjek budaya harus dengan persetujuan pemerintah kolonial.¹¹⁶ Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi benda-benda budaya yang berpotensi dijarah dan diperdagangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Di sisi lain mengakibatkan kepemilikan seluruh peninggalan budaya dan harta karun di Hindia Belanda menjadi milik negara Belanda dan berhak untuk membawa benda-benda tersebut ke Belanda hingga pemerintah kolonial berakhir pada 1942.

¹¹⁴ Paul Michael Taylor, *Collecting Icons of Power and Identity: Transformations of Indonesian Material Culture in the Museum Context*. *Cultural Dynamics* (Vol. 7, No.1, 1995), hlm.108.

¹¹⁵ Peter Boomgard, *op.cit.*, hlm. 3.

¹¹⁶ Van Beurden, *op.cit.*, hlm. 78.

BGKW sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah kolonial menjadi penasihat utama dalam hal pelestarian budaya di Hindia Belanda. BGKW memainkan pengaruh dalam melobi pemberlakuan larangan ekspor benda-benda bersejarah Indonesia dari wilayah koloni tanpa izin Gubernur Jenderal.¹¹⁷ BGKW juga memperoleh fungsi koordinasi dalam pengumpulan dan pengalokasian artefak-artefak arkeologi yang ditemukan di Hindia Belanda dan hak pertama untuk membeli benda-benda untuk koleksinya sendiri.¹¹⁸ Urusan pengumpulan benda-benda bersejarah di Hindia Belanda memang mutlak dimiliki oleh BGKW sebelum berdirinya *Oudheidkundige Dienst* pada tahun 1913 namun terdapat persaingan kepentingan dengan Museum *Volkenkunde* (sebelumnya bernama *Rijks Ethnographisch Museum*) yang bercita-cita untuk menjadi pusat kegiatan etnografi di Kerajaan Belanda.

Menurut BGKW, *museum van het BGKW* di Batavia sudah selayaknya menjadi tempat penyimpanan benda-benda kuno Hindia Belanda, sedangkan museum *Volkenkunde* di Leiden berpendapat bahwa benda-benda tersebut lebih mudah diakses oleh para ilmuwan di Belanda. Pada tahun 1862, persaingan antara Leiden dan Batavia mencapai puncaknya ketika pemerintah Hindia Belanda memutuskan bahwa BGKW memiliki fungsi koordinasi dan inventarisasi serta memiliki hak untuk menentukan benda-benda apa saja yang harus tetap berada di Batavia dan benda-benda apa saja yang dapat dikirim ke Leiden.¹¹⁹

¹¹⁷ Klaas Stutje, *The History of the Indonesian Dutch Restitution Debate, Working Paper* (Amsterdam: KNAW, 2022), hlm. 7

¹¹⁸ Endang Sri Hardianti dkk., *op.cit.*, hlm. 10.

¹¹⁹ Hans Groot, *op.cit.*, hlm. 444-451.

Meski memiliki wewenang dalam hal mengatur koordinasi dan hak inventarisasi benda-benda budaya di Hindia Belanda. Dalam praktiknya benda-benda budaya yang didapatkan BGKW juga masih belum jelas. Terlebih terdapat benda-benda bersejarah di BGKW dikirim/diserahkan lagi ke pihak lain sebagai hadiah atau hibah. Beberapa koleksi yang didapatkan BGKW diketahui merupakan keikutsertaan peneliti dan hasil dari ekspedisi-ekspedisi militer kolonial. Seperti ekspedisi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ke Lombok pada 1894, militer dan peneliti BGKW menemukan naskah-naskah kuno dan regalia kerajaan Lombok. Benda-benda tersebut kemudian dikirim ke Batavia dan Belanda untuk diteliti lebih lanjut dan menjadi koleksi museum.¹²⁰ Selain itu ekspedisi-ekspedisi lain dan pengambilalihan benda-benda sejarah juga dilakukan pemerintah kolonial guna memperluas pengaruhnya seperti penaklukan kerajaan-kerajaan Bali, Sulawesi, dan Kalimantan.¹²¹

Salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mencapai desentralisasi adalah ekspedisi militer Belanda. Menurut Furnivall, dua prinsip utama proyek adalah efisiensi dan otonomi.¹²² Tujuan pelaksanaan ekspedisi tersebut adalah untuk memaksa kerajaan-kerajaan lokal untuk bekerja sama dengan Belanda dalam upaya mengatur wilayah mereka sendiri. Scholten juga menganggap ekspedisi

¹²⁰ Petrik Mattanasi, "Selamatkan Negarakertagama dari Aksi KNIL", *Historia*, *op.cit.*

¹²¹ Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Jilid IV 1948*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 86

¹²² Furnivall, *Hindia Belanda/Studi tentang Ekonomi Majemuk* (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 279

militer ke luar wilayah Jawa, terutama di Sulawesi, sebagai upaya Belanda untuk menguasai seluruh Hindia Belanda.¹²³

Pemerintah Belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah Nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa.¹²⁴ Ekspedisi militer telah dijalankan pada periode menjelang akhir abad ke-19 dalam rangka mengurangi sejumlah gangguan sosial, politik, dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda.¹²⁵

Pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak melakukan ekspedisi militer untuk menghapus pemberontakan dan menguasai wilayah. Mereka juga mengambil harta benda penguasa lokal.. Salah satu ekspedisi yang dilakukan pemerintah kolonial juga melibatkan peneliti dari BGKW adalah ekspedisi di pulau Lombok pada tahun 1894. Dalam ekspedisi ini, J.L. Brandes, peneliti BGKW yang ikut serta dalam ekspedisi menemukan ratusan harta karun dan beberapa naskah- naskah kuno yang kemudian sebagian teridentifikasi sebagai Naskah Negarakertagama di

¹²³ Locher-Scholten, Elsbeth. "Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago around 1900 and the Imperialism Debate." *Journal of Southeast Asian Studies* (Vol.25, No.11, 1994). hlm. 94.

¹²⁴ Nur Laely, Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942, *Skripsi* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), hlm. 3.

¹²⁵ La Ode Rabani, Sarkawi. B. Husain dan Johny Alfian Khusyairi, *Rempah, Kolonialisme, dan Kesenambungan Ekonomi Di Pantai Timur Pulau Sulawesi* (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022), hlm. 47.

reruntuhan puing istana kerajaan Lombok.¹²⁶ Naskah Negarakertagama merupakan salah satu bukti sejarah penting yang diteliti lebih lanjut oleh berbagai peneliti, naskah ini pula kemudian dikirim ke Belanda sebagai koleksi.¹²⁷

Selain ekspedisi, kunjungan pejabat pemerintah kolonial ke sebuah situs bersejarah memiliki dampak bagi penemuan benda bersejarah. Nicolous Engelhard, seorang gubernur Jawa, pada tahun 1804 mengunjungi Candi Singosari dan mengambil enam arca besar dari dalam candi untuk ditempatkan di halaman rumahnya di Semarang.¹²⁸ Koleksi arca yang dimiliki Engelhard ternyata juga menarik perhatian CGC. Reinwardt, Direktur Komisi yang mengurus pertanian, seni, dan ilmu pengetahuan Hindia Belanda. Bersama Gubernur Jenderal Van der Capellen, mereka mengunjungi Semarang pada Agustus 1817 dan meminta enam arca tersebut diangkut ke Batavia. Beberapa arca tersebut sebagian tiba di Buitenzorg dan sebagian lainnya dikirim ke Belanda. Di Belanda, arca-arca tersebut dikirim ke taman Institut Ilmu pengetahuan Belanda, cikal bakal KNAW saat ini. Koleksi arca yang dimiliki institut kemudian dipindahkan lagi ke *Rijksmuseum* Leiden sebagai koleksi pada 1841 dan pada awal abad ke-20 berpindah lagi ke *Museum Volkenkunde*.¹²⁹

¹²⁶ Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara Sejarah Indonesia* (Jakarta; Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hlm. 67.

¹²⁷ Hasan Muarif Ambary dan Jajat Burhanuddin. *Menemukan peradaban: Jejak arkeologis dan historis islam Indonesia*. (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.219.

¹²⁸ Marieke Bloembergen and Martijn Eickhoff, *The Politics of Heritage in Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 3.

¹²⁹ Amanda Rachmadita, “Perjalanan Arca Candi Singhasari Kembali ke Indonesia” <https://historia.id/kuno/articles/perjalanan-arca-candi-singhasari-kembali-ke-indonesia-DLgaA/page/3>, diakses pada 31 Desember 2023

Untuk penyerahan benda budaya ke pihak lain seperti pada tahun 1896, beberapa koleksi arca diberikan kepada Raja Chulalongkorn dalam kunjungannya di Museum BGKW, sebagian juga oleh Gubernur Jenderal dan sebagian lainnya oleh Mangkunegara VI di Surakarta. Sebagian koleksi tersebut masih dapat ditemukan di Museum Bangkok, namun pada 1926 beberapa relief ramayana dari Candi Prambanan yang diserahkan ke Siam berhasil dikembalikan ke lokasi asalnya setelah intervensi dari arkeolog Belanda, Konservator Museum di Siam, dan Saudara Raja, Prince Damrong.¹³⁰

Hal ini menarik adalah permintaan restitusi benda-benda ini sebagian besar dipicu oleh penyesalan dan kemarahan para arkeolog Belanda dari BGKW, wartawan, dan pemerintah. Mereka menyesalkan kurangnya kepedulian dan intervensi pemerintah kolonial dalam penodaan candi-candi Jawa yang ceroboh. Raja Siam sendiri telah memodifikasi daftar keinginannya karena dia menyadari bahwa beberapa benda yang diinginkannya "milik orang Jawa" dan dengan demikian tidak boleh disingkirkan.¹³¹

Setelah kemerdekaan Indonesia, usaha pemulangan (repatriasi) benda-benda budaya dari Belanda ke Indonesia mulai dirintis sejak tahun 1954. Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada 1954 menyampaikan rencana pemulangan benda budaya di luar negeri. Pemerintah Belanda kemudian menyetujui bersama pemerintah Indonesia pada tahun 13 Juli

¹³⁰ Bloembergen and Eickhoff, "Exchange and the Protection of Java's Antiquities: A Transnational Approach to the Problem of Heritage in Colonial Java," *Journal of Asian Studies*, (Vol. 72, No.4, 2013), hlm. 899-903.

¹³¹ *Ibid.*

dan 24 Juli 1954 untuk menyerahkan beberapa koleksi benda bersejarah yaitu¹³²:

1. Schedel Sangiran (fosil tengkorak), yang waktu itu berada pada Prof. Koningwald;
2. Keropak Negarakrtagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca disimpan di Museum Leiden;
3. Arca asli Prajñaparamita, disimpan di Museum Leiden;
4. Manuskrip dalam bahasa Melayu, Jawa Sunda Madura dan lain-lain dialek bahasa Indonesia;
5. Schedel Trinil Du Buis di Leiden;
6. Oorlogsdocumenten, (dokumen-dokumen perang) sesudah tahun 1940;
7. Peta-peta lama, peta-peta geologi dari Indonesia.

Namun rencana pengembalian sempat mengalami kendala karena situasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang memburuk akibat masalah Irian Barat. Rencana pengembalian benda-benda bersejarah tersebut baru mulai terealisasi ketika kunjungan Presiden Soeharto ke Belanda pada tahun 1970.

Repatriasi atau pemulangan benda-benda bersejarah Indonesia baru terwujud tahun 1972 dengan pengembalian naskah Negarakertagama disusul arca Ken Dedes “Prajnaparamita” pada tahun 1975 setelah proses yang cukup alot.¹³³ Beberapa benda budaya Indonesia yang ada di Belanda secara bertahap dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1976 diserahkan fosil Gajah Kerdil dan Kura-kura raksasa dari Flores, Timor dan tahun 1977 penyerahan benda-benda untuk Museum Zoologi

¹³² Nunus Supardi, Ken Dedes Pulang Kampung, *Prajnaparamita* (2016), hlm. 23.

¹³³ Nunus Supardi, *op.cit.*, hlm. 24.

Bogor serta pada tahun 1978, antara lain: berbagai pusaka/keris Lombok, Bali, Jawa, berbagai perhiasan emas (cincin), pelana kuda, payung, sanggurdi dan tombak Pangeran Diponegoro. Selain itu juga dikembalikan berbagai arsip dan dokumen penting dari Belanda yang disimpan di Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Dari Yayasan Oranje-Nassau Belanda dikembalikan sebuah lukisan karya Raden Saleh mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro.¹³⁴

Setelah tiba di Indonesia berbagai koleksi yang dipulangkan itu dipamerkan di Museum Nasional Jakarta dalam rangka memeringati 200 tahun berdirinya Museum Nasional pada 24 April 1978.¹³⁵ Tanggal tersebut merujuk pada pendirian yang perkumpulan masyarakat ilmiah yang bernama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Usaha repatriasi terus dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia, yang terbaru pada tahun 2022 pemerintah Indonesia mengajukan permintaan pengembalian empat arca Candi Singasari yaitu arca Durga, Mahakala, Nandiswara, dan Ganesha. Pengembalian benda bersejarah dari Candi Singasari tersebut baru resmi diserahkan pada 10 Juli 2023 di Museum *Volkenkunde* (sekarang bernama *Nationaal Museum van Wereldculturen te Leiden*).¹³⁶

Terdapat 432 benda bersejarah Indonesia yang dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia secara bertahap. Benda-benda bersejarah tersebut di antaranya¹³⁷:

¹³⁴ *Ibid.*, hlm.27.

¹³⁵ Nunus Supardi, *op.cit.*, hlm. 27.

¹³⁶ Amanda Rachmadita, “Perjalanan Arca Candi Singhasari Kembali ke Indonesia” *op.cit.*

¹³⁷ Katadata, “472 Benda Bersejarah Indonesia Dikembalikan Belanda, Ini Daftarnya!”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/472-benda-bersejarah-indonesia-dikembalikan-belanda-ini-daftarnya> diakses pada 31 Desember 2024

1. Harta karun dari Kerajaan Lombok: 335 benda
2. Koleksi benda seni Pita Maha: 132 benda
3. Arca Singasari: 4 benda
4. Keris Puputan Klungkung dari Bali: 1 benda

Pada 17 Agustus 2023, gelombang pertama benda repatriasi, berupa 4 arca dari Candi Singosari diberangkatkan ke Indonesia. Gelombang kedua benda repatriasi diterima pada 9 November 2023 dan gelombang terakhir diperkirakan akan tiba pada akhir 2023. Benda-benda tersebut sementara disimpan di Museum Nasional Indonesia dan dipamerkan pada pameran bertajuk “Repatriasi: Kembalinya Saksi Bisu Peradaban Nusantara” diselenggarakan pada tanggal 28 November hingga 10 Desember 2023 di Galeri Nasional Indonesia.¹³⁸

Repatriasi dilakukan tidak sekedar pengembalian benda-benda sejarah ke Indonesia tetapi juga memproduksi ulang ilmu pengetahuan. Diperlukan penelitian asal usul benda tersebut atau *provenance research*. Sekaligus penulisan ulang sejarah dari artefak dan benda bersejarah yang kembali ke Indonesia. Penelitian asal usul sejatinya memaparkan sejarah sosial, budaya dan sejarah pembentukan harta warisan; inilah sejarah-sejarah yang melampaui pertanyaan tentang asal usul yang ‘sederhana’.¹³⁹

¹³⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. *Siaran Pers Museum Nasional*, 27 November 2023. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/11/kemendikbudristek-gelar-pameran-repatriasi-kembalinya-saksi-bisu-peradaban-nusantara> . diakses 14 Desember 2023.

¹³⁹ Jona Mooren, Klaas Stutje, dan Frank van Vree, *Laporan akhir Proyek Rintisan Penelitian Asal Usul Benda-Benda dari Era Kolonial: Provenance Research on Objects of the Colonial Era* (Amsterdam: NMVW, Rijksmuseum Amsterdam dan NIOD/ECR, 2022).